

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional harus dilakukan secara merata, berkesinambungan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pembangunan tersebut diperlukan sumber dana yang besar. Pada awal berdirinya NKRI, pemerintah lebih mengandalkan penerimaan dari sektor minyak dan gas (migas) sebagai unsur penerimaan negara yang utama. Seiring berjalannya waktu, pajak menjadi unsur yang dominan dalam penerimaan negara setelah sektor migas semakin menipis dan tidak lagi bisa diandalkan. Sebagai sumber penerimaan utama, otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan pemerintah. Sampai saat ini hampir 80% penerimaan negara ditopang dari sektor pajak. Pajak akan dipergunakan dalam pembiayaan untuk pembangunan demi tercapainya tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pemerintah yang menangani perpajakan di Indonesia dituntut untuk menggali potensi pajak dengan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. .

Awal perkembangan DJP dimulai pada tahun 1983, yaitu dengan melakukan suatu reformasi perpajakan dengan ditandai munculnya *Self Assessment System*, yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besar pajak terutangnya sendiri. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan tanggapan yang lebih positif dari masyarakat terhadap image DJP.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2002, DJP melaksanakan program modernisasi perpajakan yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional. Sasaran utama dari program tersebut adalah optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, peningkatan kepatuhan sukarela melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang konsisten, penerapan sistem administrasi yang handal dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan pelaksanaan *Good Governance*.

Salah satu sasaran dari program modernisasi tersebut adalah adanya pelayanan prima yang dilakukan oleh DJP kepada Wajib Pajak dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan masyarakat. Aspek pelayanan tersebut meliputi: penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT). Di dalam proses penerimaan dan pengolahan SPT itu terdapat perekaman SPT oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Seksi PDI merupakan pusat data dan informasi yang menyimpan sebagian besar data di Kantor Pelayanan Pajak. Tugas Seksi PDI diantaranya adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis, dan pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling. Jadi, Seksi PDI mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang valid kepada pihak-pihak yang memanfaatkannya, seperti *Account Representative*.

Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT kedalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, memindahkan data atau informasi digital dari media elektronik atau jaringan komunikasi data ke sistem informasi perpajakan di Direktorat Jendral Pajak. Perekaman berfungsi untuk menyimpan data Wajib Pajak ke dalam masterfile Wajib Pajak pusat menuju era digitalisasi data perpajakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses perekaman SPT yang menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), tentunya terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya mengingat fitur-fitur yang ada didalamnya dengan mengharuskan sistem selalu dalam keadaan online. Sehingga, diperlukan aplikasi baru guna memperlancar proses perekaman data SPT di database lokal yaitu aplikasi Perekaman SPT Lokal. Dalam Rencana Tugas Akhir ini, penulis akan melakukan tinjauan atas efektivitas perekaman SPT Masa PPh 21/26, dengan rincian antara lain : tinjauan perekaman SPT Masa PPh 21/26 antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas perekaman SPT Masa PPh 21/26, dan bagaimana hubungannya. Selain itu, penulis juga akan melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang ada di KPP Pratama Bangkinang dalam rangka perekaman SPT Masa PPh pasal 21/26 dan solusi yang bisa dilakukan.

Dalam melakukan analisis untuk mengetahui persentase efektivitas perekaman SPT yang dilakukan oleh seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di KPP Pratama Bangkinang, kita harus mengetahui jumlah SPT yang telah dilakukan perekaman dibandingkan dengan jumlah SPT yang diterima oleh KPP Pratama Bangkinang.

**Tabel I.I Perekaman SPT per tahun pajak 2015-2017**

No	Tahun Pajak	Jumlah BPS manual	SPT Belum direkam	Total perekaman	Persentase Efektivitas
1	2015	42.779	654	42.125	98,47 %
2	2016	52.911	10.877	42.034	79,44 %
3	2017	51.139	19.448	31.691	61,97 %
	Jumlah	146.829	30.979	115.850	-
	Rata-rata	48.943	10.326	38.617	79,96 %

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bangkinang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.I memperlihatkan perekaman SPT secara keseluruhan per tahun pajak 2017. Dari tabel I.I, pada tahun pajak 2015 terlihat bahwa jumlah BPS manual yang diterima KPP Pratama Bangkinang sebesar 42.779 buah dengan total perekaman sebesar 42.125 buah dan sisanya 654 buah masih belum direkam. Tingkat efektivitas perekaman tahun 2015 sebesar 98.47%. Nilai tersebut tergolong sangat baik, karena hampir semua SPT sudah direkam.

Pada tahun pajak 2016, dari total BPS manual yang diterima sebesar 52.911 buah, sebanyak 10.877 buah belum direkam. Sehingga, total perekaman sebesar 42.034 buah. Tingkat efektivitas perekaman tahun 2016 menurun daripada tahun 2015, yaitu sebesar 79,44%. Sedangkan pada tahun pajak 2017, jumlah BPS manual yang diterima adalah sebesar 51.139 buah dengan total perekaman sebesar 31.691 buah, sisanya 19.448 buah belum direkam. Sehingga dari jumlah tersebut, tingkat efektivitas perekaman pada tahun pajak 2017 ini tergolong rendah karena hanya sebesar 61,97%. Persentase ini sangat menurun tajam dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan tabel di atas, dari tahun pajak 2015 sampai dengan tahun pajak 2017 apabila diakumulasikan terdapat 146.829 buah BPS manual yang diterima oleh KPP Pratama Bangkinang. Jika dirata-rata hampir 48.943 buah BPS manual diterima tiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 115.850 telah dilakukan perekaman, dengan rata-rata 38.617 tiap tahun. Sisanya, hampir 30.979 buah atau rata-rata 10.326 tiap tahunnya belum direkam. Sehingga dari jumlah tersebut dapat diketahui rata-rata efektivitas perekaman SPT yaitu sebesar 79,96% per tahun.

Efektivitas ialah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan pemikiran itulah, penulis berusaha mengkaji lebih jauh mengenai efektivitas proses perekaman SPT Masa PPh 21/26 tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkan pembahasan tersebut dalam Tugas Akhir dengan judul **“TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN 21/26 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah di sebutkan penulis di atas dapat dirumuskan permasalahan penulis sebagai berikut: “Bagaimana efektivitas perekaman SPT Masa PPh 21/26 di KPP Pratama bangkinang dan upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada berkaitan terhadap perekaman SPT Masa PPh 21/26 di KPP Pratama Bangkinang”?

## 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

### 1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui efektivitas perekaman di dalam lapangan kerja dengan menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama pendidikan di Program Diploma III dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat



dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada berkaitan terhadap perekaman SPT Masa PPh 21/26 di KPP Pratama Bangkinang.

### 1.3.2 Manfaat Penulisan

#### 1. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta pengetahuan penulis tentang kegiatan kegiatan Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan 21/26 Di KPP Pratama Bangkinang dari proses awal hingga selesai.

#### 2. Bagi Akademis

Dapat menambahkan informasi pembelajaran bagi mahasiswa Jurusan DIII Administrasi Perpajakan selanjutnya mengenai kegiatan Perekaman KPP di lapangan, serta dapat dijadikan sebagai informasi dan acuan bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir yang ada kaitannya dengan judul penulisan ini.

#### 3. Bagi Instansi

Dapat dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan kinerja dan efektifitas dari Kegiatan Perekaman bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

### 1.4. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam masalah ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi pembahasannya hanya tentang pelaksanaan Kegiatan Perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan 21/26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dari Tugas Akhir ini menitikberatkan pada tinjauan atas efektivitas perekaman SPT Masa PPh 21/26 pada seksi PDI di KPP Pratama Bangkinang.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1 Tempat dan waktu penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai selesai.

### 1.6.2 Jenis Data

- a. Data skunder yaitu data yang bersumber dari media perantara atau yang secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, dan arsip dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan penulisan tugas akhir ini melalui tempat atau lokasi Kantor KPP Pratama Bangkinang
- b. Data primer yaitu data yang data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan wawancarai secara langsung kepada Pegawai Kantor KPP Pratama Bangkinang.

### 1.6.3 Teknik pengempulan data

Merupakan teknik yang melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data-data yang ada di lapangan dan diteliti dengan mencatat keterangan atau hal-hal yang berguna bagi penyusunan tugas akhir ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Interview/ Wawancara

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang bisa memberikan informasi tentang penelitian ini.

#### b. Observasi

Merupakan teknik yang melakukan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data-data yang ada di lapangan dan diteliti dengan mencatat keterangan atau hal-hal yang berguna bagi penyusunan tugas akhir ini.

### 1.7. Sistematika Penulisan

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, visi misi, dan uraian tugas dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, serta struktur organisasi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

#### BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan teori atau konsepsi yang digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data dan fakta yang berkaitan



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan judul dan pokok pembahasan mengenai Tinjauan atas efektivitas perekaman surat pemberitahuan masa pajak penghasilan 21/26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini, yang mana dalam bab ini akan memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**